



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI (DPMD/N)
TAHUN 2022**

Sarilamak, Agustus 2021



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA,SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renja DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renja merupakan amanat UU No 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun.

Dokumen Renja DPMD/N Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD). Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan penyusunan dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja DPMD/N Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025, serta telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2022 bertujuan agar perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat terlaksana secara berkesinambungan dan sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunannya dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020-2021, evaluasi capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Sehingga diharapkan Program, Kegiatan yang disusun dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja DPMD/N Tahun 2022.

Dalam penyusunan Renja ini, terdapat dukungan dari berbagai pihak yaitu dari internal DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari para pemangku kepentingan. Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Penyajian Renja ini masih belum sempurna, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan dokumen Renja di

masa mendatang. Demikianlah Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA**

Drs. A. ZUHDI PERAMA.P, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
NASKAH PERATURAN BUPATI	
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD/N TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	II-16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N	II-18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD/N	III-4
3.3. Program Dan Kegiatan	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-10
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Utama Kepala DPMDN	II-17
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	II-41
Tabel 3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	III-7
Tabel 3.2	Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-9
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-11
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-12
Tabel 4.1.	Rencana Target Kinerja DPMD/N.....	IV-1
Tabel 4.2.	Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022..	IV-2
Tabel 4.3.	Rencana Indikator Kinerja Kepala Daerah Tahun 2022..	IV-2
Tabel 4.4.	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	IV-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan November 2020, dan akan selesai pada bulan Juli 2021.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang

Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan November 2020.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (n-1). Akan tetapi karena Kabupaten Lima Puluh Kota dalam masa peralihan Kepala Daerah periode 2016-2021, maka rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2022, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2020. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2022 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2021.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum

Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2022 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat

Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2022 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Seperti halnya RKPD 2022, maka Renja DPMD/N Tahun 2022 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-1 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari periode tahun 2021-2026. Renja DPMD/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor).
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2022, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020-2021 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja serta Pendanaan yang dibutuhkan.

V. Penutup.

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2020, dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2020, terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan. Hal ini disebabkan terjadinya

bencana nasional **Covid-19**. Anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Pengurangan anggaran menyebabkan perangkat daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan. Terutama kegiatan bimbingan teknis/pelatihan dan sosialisasi tidak dapat dilakukan karena adanya arahan dari Pemerintah Pusat untuk pembatasan berkumpulnya massa. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana tersebut antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,-. Realisasi keuangan 100%.
2. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes, yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,-. Realisasi keuangan 100%.
3. Perlombaan Desa dan Kelurahan, yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.081.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.080.000,-. Realisasi keuangan 100%.
4. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan, tidak dapat dilaksanakan karena setelah refocusing tidak bisa dianggarkan lagi.
5. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.860.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.860.000,-. Realisasi keuangan 100%.
6. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.081.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.080.000,-. Realisasi keuangan 100%.
7. Bimbingan Pengelolaan Aset dan Kekayaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.295.000,-. Realisasi keuangan 100%.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2020, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,815,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,302,000,- (71,47%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39,900,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28,757,304,- (72,07%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangani, yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30,050,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 295,562,000,- (95,64%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
4. Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja, yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,600,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,600,000,- (100,00 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24,690,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.24,690,000,- (100,00.%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24,280,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24,182,041,- (99,60%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,750,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,750,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,500,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2,500,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18,750,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18,748,000,- (99,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86,613,317,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.832,168,001,- (96,02%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4,600,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.43,695,966,- (94,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
2. Kegiatan pengadaan mebeleur yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,757,500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,662,750,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96,950,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.95,040,549,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16,849,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.15, 510,000,- (92,05%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %.
2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semester yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (92,05 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
3. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,880,000,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 2,880,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

IV. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,830,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,830,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
2. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1000,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1000,000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
3. Kegiatan pemberdayaan teknologi tepat guna yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.900,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
4. Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pembangunan kehidupan social budaya masyarakat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.990,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.990,000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
5. Kegiatan pembinaan PKK yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308,695,500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.296,789,900,- (96,14%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
6. Kegiatan penyelenggaraan pembentukan pemekaran pengembangan dan penghapusan batas nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170, 495,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.40,490,000,- (23,75%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 28,90%.

V. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1000,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1000,000,- (23,75%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13,000,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12,965,000,- (99,37%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%
3. Kegiatan perlombaan desa dan kelurahan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22,081,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.22,080,000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

VI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,165.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.10,165.000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
2. Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,105,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,105,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
3. Kegiatan pemantapan data profil dan monografi nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3,535,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,535,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
4. Kegiatan Pembinaan kelompok pengelola prasarana fasilitas umum (KPP FASUM) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3,890,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,890,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %.
5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,755,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.13,540,000,- (98,44%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

VII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.2.860,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.860,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

2. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23,830,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.23,830,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
3. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.755,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.755,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

VIII. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,190,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,190,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
2. Kegiatan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,500,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1,500,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
3. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.800,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.
4. Kegiatan bimtek pengelolaan asset dan kekayaan tentang APB desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,295,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1,295,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

IX. Program Penataan Peraturan Perundangan

1. Kegiatan fasilitas penyusunan produk hukum nagari bagi skala kabupaten dan nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,825,000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,825,000,- (100,00%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2020 tidak terdapat program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai 86.06%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah karena adanya kebijakan *refocussing* anggaran terkait bencana nasional **Covid-19**. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
2. Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes.
3. Perlombaan Desa dan Kelurahan.
4. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.
5. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa.
7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Kekayaan.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu, terhadap pencapaian target dan realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 94.41%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 42.70%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97.6%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 13.39%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 90.46%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 97.47%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 27.04%.
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 70.79%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 75.05%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 15.91%.
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99.90%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 6.30%.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99.34%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 99.34%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 3.96%.
7. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 100.00%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 5.16%.
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 100.00%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 0.63%.
9. Program Penataan Peraturan Perundangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 100.00%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2020 adalah sebesar 2.57%.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2020-2021 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan terhadap target Renstra rendah. Kebijakan refocussing anggaran pada tahun 2020, mempengaruhi tingkat capaian kinerja program/kegiatan. Dengan adanya perubahan Renja DPMD/N tahun 2020, target kinerja direvisi sebagai upaya untuk menghadapi kendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Sehingga diharapkan usulan program/kegiatan dan pagu anggaran urusan pemberdayaan masyarakat sesuai Renja tahun 2022 dapat diakomodir pada APBD tahun 2022 nantinya.

Sedangkan untuk pencapaian target kinerja DPMD/N sesuai Renstra DPMD/N pada akhir tahun 2020, secara rata-rata telah tercapai. Terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Monitoring, Evaluasi dan Penyelenggaraan, Pembentukan, Pemekaran, Pengembangan Nagari. Sehingga pada Renja tahun 2022 ini, kegiatan ini nanti akan menjadi salah satu prioritas untuk diusulkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 (Tabel T.C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan
Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
X	Kx	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	26%	24%	24%	100	24%		
X	Kx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen dan surat	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
				Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
X	Kx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kelengkapan komputer yang diadakan	60 bulan	36 bulan	-	-		12 bulan	
X	Kx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB yang dibayar honoronya dan jumlah hari kerja TGL yang dibayarkan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata servis peralatan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak,Jumlah Lembar penggandaan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	36 bulan	-	-		12 bulan	
X	Kx	1	6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	60 bulan	36 bulan	-	-		12 bulan	
X	Kx	1	7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
X	Kx	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur							
X	Kx	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	9 unit kend roda 2 & 2 unit kend roda 4	2 unit kend roda 2	-	-		1 unit kend roda 4	
X	Kx	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Paket Pertengkapan Gedung Kantor yang diadakan	32 paket	-	-	-		4 paket	
X	Kx	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Laptop ,UPS,Fotocopy ini ,layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	26 paket	2 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
X	xx	2	0		Pengadaan mebeleur	jumlah meubeleur yang diadakan	14 paket	1 paket	1 paket	100	3 paket		
X	xx	2	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	3 paket	-	-	-	3 Paket		
X	xx	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	263 kgt	36 kgt	60 kgt	60 kgt	100	60 Kgt	
X	xx	2	26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Rutin/berkala Gedung Kantor	50 kgt	10 kgt	-	-	-	10 Kgt	
X	xx	2			Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	jumlah Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur	2 paket	-	-	-	1 Paket		
					Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor	jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	3 paket	-	-	-	1 Paket		
X	xx	3			Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur				-			
					Pengadaan mesin/kartu absensi yang diadakan	jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	-	-	-	1 Unit		
X	xx	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	41 stel	-	-	-	40 Stel		
			4		Pengadaan Pakaian Kopri	jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stel	-	-	-	35 Stel		
X	xx	3	5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan	106 stel	-	-	-	40 Stel		
X	xx	5			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan							
X	xx	5	1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti Diklat	12 orang	3 orang	-	-	4 orang		
			0		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	32 orang	-	-	-	-		
			0		Bimtek Peraturan Perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	46 orang	-	-	-	-		
X	xx	6			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat perkembangan sistem pelaporan							
X	xx	6	1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LKJIP SPIP,LKPJ,SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang ,Laporan bulanan ,laporan adm	55 dokumen	11 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	7 dokumen	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
		6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
		6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1				URUSAN WAJIB									
		5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan								
X	xx	5	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMTAS) dan Fasilitasi KKN	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu	100	549 posyandu		
X	xx	5	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100	1 kgt		
X	xx	5	3	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Posyantek yang terbentuk	37 posyantek	5 posyantek	-	-	-	8 posyantek		
				Pemberdayaan Teknologi Tepat Sana	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 kgt	-	3 kgt	3 kgt	100	3 kgt	-	
X	xx	5	5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.	79 LPM		60 LPM	60 LPM	100	60 LPM		
				Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan Kelompok PKK se-Kab. Lima Puluh Kota	93 klpk	93 klpk	93 klpk	93 klpk	100	93 klpk		
				Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran Pengembangan dan Penghapusan Batas Nagari	Persentase nagari yang difasilitasi untuk pemekaran nagari	133%	-	20%	20%	100	20%		
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran pengembangan Nagari	Persentase Nagari yang pemantauan dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan menetapkan batas nagari	127%	-	43%	1.5%	28.90	43%		
X	xx	5	5	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan anggota lembaga adat se-kab. Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	5 kgt	1 kgt	-			1 kgt		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
X	xx	5	6	Pemberdayaan Usaha Masyarakat dalam Peningkatan Peran Perempuan	-	93 klp	-	-	-	-	-	-	-
		6		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
X	xx	6	2	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	95%	45%	80%	80%	100	90%		
X	xx	6	5	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Pedesaan	62 klpk	62 klpk	-	-		62 klpk		
X	xx	6	6	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	15 kgt	3 kgt	-	-		3 kgt		
X	xx	6	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan dan terlaksananya movev kegiatan P3MD di Nagari	6 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	100	2 kgt		
					Jumlah Lembaga Ekonomi yang dimonitoring	115 klpk		109 klpk	109klpk	100			
x	xx	6	5	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan	79 nagari	46 nagari	79 nagari	79 nagari	100	79 nagari		
		7		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa									
x	Kx	7	1	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan kelompok Masyarakat Membangun Desa	80 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	79 nagari		
					Jumlah Nagari yang akan melaksanakan TMMN dan BBGRM								
x	Kx	7	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	100%	30%	75%	75%	100	75%	-	-
x	Kx	7	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa	100%	20%	-	-	-	-	-	-
x	Kx	7	4	Monitoring dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat	100%	65%	35%	35%	100	-		
x	Kx	7	5	Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	Persentase nagari dengan status berkembang dan maju	100%	91%	9%	9%	100	-		
					Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2021		Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)
X	Xx	7	6	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum KPP-FASUM)	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan money kelembagaan KPP-FASUM	114 klp	103 klpk	106 klpk	106 klpk	100	106 klpk		
		8		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa									
X	Xx	8	1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah peserta Bimtek pengelola kawasan pedesaan	120 orang	-	-	-	-	30 orang		
X	Xx	8	2	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	723 orang	79 orang	79 rang	79 orang	100	184 orang		
X	Xx	8	3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	395 orang	79 orang	79 orang	100	158 orang		
X	Xx	8	4	Rapat koordinasi dan rapat kerja wali nagari	Persentase tingkat kehadiran Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	100%	100%	-			100%		
X	Xx	8	9	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Bamus Nagari yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan Bamus Nagari dan terlaksananya Pilwanag	100%	22%	22%	22%	100	33%		
		20		Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa									
X	Xx	20	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari tepat waktu di Kecamatan	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	79 nagari		
X	Xx	20	3	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	78 buah	7 buah	7 buah	7 buah	100	7 buah		
X	Xx	20	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 nagari	7 nagari	79 nagari	79 nagari	100	79 nagari		
X	Xx	20	5	Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	79 nagari	79 nagari	79 Nagari	79 Nagari	100	79 nagari		
		24		Program Penataan Peraturan Perundangan									
		24	1	Fasilitasi penyusunan produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan di luar rang wajib)	100%	15%	30%	30%	100	30%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila diisuesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2 (Tabel T.C. 30)

Pencapaian Indikator Utama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70	72	74	75	73		75		
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	30%	50%	75%	100%	58%		100%		
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75%	80%	90%	95%	88.52%		95%		

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DPMD/N terdiri atas dua (2) sasaran yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dan meningkatnya keberdayaan masyarakat. Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari mempunyai dua (2) indikator yaitu: jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju, serta persentase nagari yang menetapkan RKP tepat waktu. Sedangkan meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator persentase badan usaha milik nagari yang aktif. Pada Tahun 2020, Kepala DPMD/N telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
4. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
5. Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaran tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.
3. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
4. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas DPMD/N ini akan berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan menghadapi isu strategis nasional. Isu strategis nasional yang terkait pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah upaya percepatan penanganan stunting. Sedangkan untuk pencapaian visi dan

misi kepala daerah terpilih periode tahun 2021-2026, terkait dengan misi satu (1) dan tiga (3). Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan**. Misi tiga (3) adalah **Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah**. Program/kegiatan/ subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah program-program yang dapat mengatasi dan meminimisir permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD/N. Serta program yang dapat mendorong percepatan pencapaian target kinerja sesuai visi misi kepala daerah dan isu strategis nasional.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada DPMN hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Nagari.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi DPMD/N Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.
3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.

4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Nagari.
4. Belum Optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan Ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum Optimal penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja DPMD/N terlihat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan. Hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 (Tabel T.C.31)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,667,348,877	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,667,348,877	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	151,578,200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	151,578,200	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMDN	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	50,010,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMDN	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	1 Dokumen	50,010,700	Rutin OPD
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	12,015,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	12,015,000	Rutin OPD
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	11,615,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	11,615,000	Rutin OPD
04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	10,806,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	10,806,000	Rutin OPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	11,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	11,200,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	5 Dokumen	37,662,000	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	5 Dokumen	37,662,000	Rutin OPD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMDN	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	4 Laporan	18,269,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMDN	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	4 Laporan	18,269,500	Rutin OPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3,220,285,377	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3,220,285,377	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMDN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	27 ASN	2,799,958,677	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMDN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	27 ASN	2,799,958,677	Rutin OPD
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	12 Bulan	364,980,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	12 Bulan	364,980,000	Rutin OPD
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	3000 Dokumen	7,296,700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	3000 Dokumen	7,296,700	Rutin OPD
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	12 Bulan	10,450,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	12 Bulan	10,450,000	Rutin OPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	1 Dokumen	9,350,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMDN	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	1 Dokumen	9,350,000	Rutin OPD
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMDN	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	4 Dokumen	10,450,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMDN	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	4 Dokumen	10,450,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMDN	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	12 Dokumen	7,350,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMDN	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	12 Dokumen	7,350,000	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen			DPMDN	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen		
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMDN	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	10,450,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMDN	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	10,450,000	Rutin OPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	26,958,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	26,958,000	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7,990,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7,990,000	Rutin OPD
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	1 Dokumen	4,650,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	1 Dokumen	4,650,000	Rutin OPD
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Laporan	10,090,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 Laporan	10,090,000	Rutin OPD
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	12 Bulan	4,228,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	12 Bulan	4,228,000	Rutin OPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	171,506,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	171,506,500	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMDN	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	1 Unit	6,500,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMDN	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	1 Unit	6,500,000	Rutin OPD
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMDN	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	48 Stel	24,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMDN	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	48 Stel	24,000,000	Rutin OPD
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMDN	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	47 Dokumen	14,066,500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMDN	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	47 Dokumen	14,066,500	Rutin OPD
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	12 bulan	8,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMDN	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	12 bulan	8,000,000	Rutin OPD
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMDN	Jumlah dokumen SKP ASN	28 Dokumen	7,500,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMDN	Jumlah dokumen SKP ASN	28 Dokumen	7,500,000	Rutin OPD
08	Pemindahan Tugas ASN	DPMDN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	2 ASN	10,000,000	Pemindahan Tugas ASN	DPMDN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	2 ASN	10,000,000	Rutin OPD
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMDN	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 ASN	17,375,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMDN	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 ASN	17,375,000	Rutin OPD
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	54,440,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	54,440,000	Rutin OPD
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	29,625,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	29,625,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	445,890,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	445,890,300	
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMDN	Jumlah alat listrik yang disediakan	6 Jenis	6,925,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMDN	Jumlah alat listrik yang disediakan	6 Jenis	6,925,000	Rutin OPD
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMDN	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	7,045,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMDN	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	7,045,000	Rutin OPD
03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMDN	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	14,900,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMDN	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	14,900,000	Rutin OPD
04	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMDN	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	6 Paket	25,000,600	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMDN	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	6 Paket	25,000,600	Rutin OPD
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMDN	Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	29,999,300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMDN	Jumlah barang cetakan yang disediakan	8 Jenis	29,999,300	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah penggandaan yang disediakan	2990 lembar			DPMDN	Jumlah penggandaan yang disediakan	2990 lembar		
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMDN	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	180 Eksemplar	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMDN	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	180 Eksemplar	3,600,000	Rutin OPD
07	Penyediaan Bahan Material	-	Jumlah bahan material yang disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Material	-	Jumlah bahan material yang disediakan	0	-	-

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMDN	Jumlah tamu yang dilayani	600 orang	18,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMDN	Jumlah tamu yang dilayani	600 orang	18,000,000	Rutin OPD
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMDN	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	150 Laporan	327,674,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMDN	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	150 Laporan	327,674,000	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah makan minum rapat yang disediakan	300 Porsi			DPMDN	Jumlah makan minum rapat yang disediakan	300 Porsi		
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMDN	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	1 Laporan	12,746,400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMDN	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	1 Laporan	12,746,400	Rutin OPD
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	0	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	0	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	900,301,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	900,301,000	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	1 Unit	370,225,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	1 Unit	370,225,000	Rutin OPD
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	4 Unit	128,876,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	4 Unit	128,876,000	Rutin OPD
05	Pengadaan Mebel	DPMDN	Jumlah filling kabinet yang diadakan	2 Unit	60,500,000	Pengadaan Mebel	DPMDN	Jumlah filling kabinet yang diadakan	2 Unit	60,500,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
		DPMDN	Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan	1 Set			DPMDN	Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan	1 Set		
		DPMDN	Jumlah lemari arsip yang diadakan	1 Unit			DPMDN	Jumlah lemari arsip yang diadakan	1 Unit		
		DPMDN	Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan	13 Unit			DPMDN	Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan	13 Unit		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMDN	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	14 unit	171,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMDN	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	14 unit	171,500,000	Rutin OPD
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	0	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	0	-	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah gudang yang diadakan	1 Unit	99,200,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah gudang yang diadakan	1 Unit	99,200,000	Rutin OPD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah tempat parkir yang diadakan	1 Paket	70,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah tempat parkir yang diadakan	1 Paket	70,000,000	Rutin OPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	270,530,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	270,530,000	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMDN	Jumlah benda pos yang disediakan	4 Jenis	5,420,000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMDN	Jumlah benda pos yang disediakan	4 Jenis	5,420,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMDN	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12 Rekening	38,400,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMDN	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12 Rekening	38,400,000	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	360 Meter Kubik			DPMDN	Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	360 Meter Kubik		
		DPMDN	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12000 KWh			DPMDN	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12000 KWh		
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMDN	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	31 Unit	20,070,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMDN	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	31 Unit	20,070,000	Rutin OPD
04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMDN	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	21 Orang	206,640,000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMDN	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	21 Orang	206,640,000	Rutin OPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD		480,299,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD		480,299,500	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	235,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMDN	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	235,250,000	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	14 unit			DPMDN	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	14 unit		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
		DPMDN	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 Unit			DPMDN	Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 Unit		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	0	-	-
05	Pemeliharaan Mebel	DPMDN	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	125 Paket	10,000,000	Pemeliharaan Mebel	DPMDN	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	125 Paket	10,000,000	Rutin OPD
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMDN	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	6 Paket	15,569,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMDN	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	6 Paket	15,569,500	Rutin OPD
		DPMDN	Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	23 Unit			DPMDN	Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	23 Unit		
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	19,840,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	19,840,000	Rutin OPD
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	150,040,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	150,040,000	Rutin OPD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	49,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMDN	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Paket	49,600,000	Rutin OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10,941,236,600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10,941,236,600	
	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	2.50%	146,050,000	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	2.50%	146,050,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	2.50%	146,050,000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	2.50%	146,050,000	
01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase penetapan dan penegasan batas desa	2.50%	146,050,000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase penetapan dan penegasan batas desa	2.50%	146,050,000	Prioritas OPD(Permendagri No. 45 Tahun 2016)
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase terbentuknya kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	54.43%	389,954,100	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase terbentuknya kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	54.43%	389,954,100	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	43 Nagari	389,954,100	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	43 Nagari	389,954,100	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	36 Nagari	212,507,100	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	36 Nagari	212,507,100	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017)
02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	7 Nagari	77,447,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	7 Nagari	77,447,000	
03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan	100,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan	100,000,000	Prioritas OPD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Nagari dengan Status Perkembangan Cepat Berkembang	58%	5,328,491,500	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Nagari dengan Status Perkembangan Cepat Berkembang	58%	5,328,491,500	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	58%	5,328,491,500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	58%	5,328,491,500	
01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari	150,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari	150,000,000	Prioritas OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	79 Wali Nagari + 79 Bamus Nagari	176,925,200	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	79 Wali Nagari + 79 Bamus Nagari	176,925,200	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 11 Tahun 2014)
			Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	49%				Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	49%		
03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	80%	730,793,200	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	80%	730,793,200	IKU OPD
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	80%	-		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	80%	-	IKU OPD
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	86%	-		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	86%	-	Prioritas OPD
04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	86%	510,230,600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	86%	510,230,600	Prioritas OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	86%	-		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	86%	-	Prioritas OPD
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	80%	-		Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	80%	-	Prioritas OPD
05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 Wali Nagari	571,500,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 Wali Nagari	571,500,000	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 83 Tahun 2016)
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari	-		Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari	-	Prioritas OPD
06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagri dan 13 Kec.	149,006,400	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagri dan 13 Kec.	149,006,400	Prioritas OPD
07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	237 Rancangan / Dokumen	94,888,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	237 Rancangan/ Dokumen	94,888,000	Prioritas OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
07	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	82%	165,994,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	82%	165,994,000	IKU OPD
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	4 BUMDesma			Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	4 BUMDesma		
08	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	52 Nagari	802,397,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	52 Nagari	802,397,000	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 112 Tahun 2014)
09	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari	150,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari	150,000,000	Prioritas OPD
11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	39 Nagari	130,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	39 Nagari	130,000,000	IKU OPD (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2012 dan Permendes No. 2 Tahun 2017)
			Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	45 Nagari				Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	45 Nagari		
			Jumlah nagari dengan status swadaya	2 Nagari				Jumlah nagari dengan status swadaya	2 Nagari		
			Jumlah nagari dengan status swasembada	28 Nagari				Jumlah nagari dengan status swasembada	28 Nagari		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
			Persentase nagari dengan status mandiri	1.25%				Persentase nagari dengan status mandiri	1.25%		
			Persentase nagari dengan status tertinggal	2.50%				Persentase nagari dengan status tertinggal	2.50%		
12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	250 Orang	487,500,000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	250 Orang	487,500,000	Prioritas OPD
13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	86%	232,785,500	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	86%	232,785,500	Prioritas OPD
14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 Orang	357,002,600	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 Orang	357,002,600	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 110 Tahun 2016)
15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	2 Nagari	322,500,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	2 Nagari	322,500,000	IKU OPD
			Terlaksananya kegiatan Orthoretifikasi Citra Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota					Terlaksananya kegiatan Orthoretifikasi Citra Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota			

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	50%	85,000,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	50%	85,000,000	IKU OPD
			Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	70%				Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	70%		
18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	46 Nagari	211,969,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	46 Nagari	211,969,000	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 81 Tahun 2015)
			Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	34 Nagari				Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	34 Nagari		
			Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3 Nagari				Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3 Nagari		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
			Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	7 Kegiatan				Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	7 Kegiatan		
			Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	3 Inovasi				Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	3 Inovasi		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	95%	5,076,741,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	95%	5,076,741,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	95%	5,076,741,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	95%	5,076,741,000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	1 Kegiatan	260,000,000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	1 Kegiatan	260,000,000	Prioritas OPD
02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	79 Kader	2,323,270,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	79 Kader	2,323,270,000	IKU OPD
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	12 PT	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	12 PT	-	Prioritas OPD
			Jumlah pembinaan KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 KPM, RDS				Jumlah pembinaan KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 KPM, RDS		Prioritas OPD
			Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga Adat				Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga Adat		Prioritas OPD
			Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga				Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga		Prioritas OPD
			Jumlah Pokja Posyandu Aktif,	5 Pokja Posyandu				Jumlah Pokja Posyandu Aktif,	5 Pokja Posyandu		Prioritas OPD
			Jumlah Rakoor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten	2 kegiatan				Jumlah Rakoor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten	2 kegiatan		Prioritas OPD

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	8
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitas Penataan , Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitas Penataan , Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi	-	Prioritas OPD
			Persentase Posyandu Aktif Mandiri	13%				Persentase Posyandu Aktif Mandiri	13%		Prioritas OPD
03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase LPM aktif	60%	860,304,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase LPM aktif	60%	860,304,000	IKU OPD
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	40 KPMD	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	40 KPMD	-	Prioritas OPD
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok BP- SPAMS dan KPP- FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan movev	60 KP- SPAM	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok BP- SPAMS dan KPP- FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan movev	60 KP- SPAM	-	Prioritas OPD
		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	3 kegiatan	-		Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	3 kegiatan	-	Prioritas OPD

No .	Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2			4	3	5	6	7			8	9	10	11	8
05			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	62 KMN	40,217,000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	62 KMN	40,217,000	
06			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	6 posyantek	242,950,000			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	6 posyantek	242,950,000	Prioritas OPD
				Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 Kgt	-				Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 Kgt	-	Prioritas OPD
07			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanangan BBGRM Tahun 2022	79 Nagari	150,000,000			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanangan BBGRM Tahun 2022	79 Nagari	150,000,000	Prioritas OPD
08			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota yang mendapatkan pembinaan	93 Klpk	1,200,000,000			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota yang mendapatkan pembinaan	93 Klpk	1,200,000,000	IKD
					Jumlah		16,608,585,477					Jumlah		16,608,585,477	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025. Karena RPJMD dan Rencana Strategis PD (RENSTRA OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota berakhir pada tahun 2021, maka penyusunan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMDN Tahun 2021-2026. Kemudian juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Renja DPMD/N Tahun 2022 juga mengakomodir Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2022 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat. Jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD/N, usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan selaras dengan isu-isu yang dikemukakan pada sub bagian 2.3 yang salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

Tabel 2.4 (Tabel T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2022 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow* program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas Program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4 program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas Kementerian Desa:

1. Prukades.

Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.

Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa.

3. BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.

4. Sorga Desa

Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Karena periode RPJMD Provinsi berakhir juga pada tahun 2021, maka penyusunannya memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Karena RKPD 2022 merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, maka dalam penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih tersebut yaitu:

Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.

3. Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Berkelanjutan.

Dari 5 misi ini yang menjadi kewenangan DPMDN untuk mencapainya adalah misi 3 (tiga) dan misi 1 (satu). Pada misi satu dengan prioritas pembangunannya adalah peningkatan peran limbago adat. Pada misi tiga, yang menjadi prioritas pembangunannya adalah pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh. Untuk mencapai misi dan melaksanakan prioritas pembangunan ini, program unggulannya adalah:

1. Peningkatan alokasi dana nagari sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.
2. Pemberian hibah untuk peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada di nagari.
3. Peningkatan kesejahteraan perangkat nagari dan lembaga adat nagari lainnya.
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik.
5. Pengembangan perekonomian nagari dengan pendampingan dan pemberdayaan serta optimalisasi pasar nagari.
6. Optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Nagari.
8. Memberikan reward kepada nagari berprestasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPMDN Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPd Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. ... Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021-2026. Dalam penyusunannya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada RPJMD propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah propinsi dengan pembangunan nasional.
- b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 dan Kebijakan Propinsi dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022. Sedangkan untuk telaahan Renstra, dilakukan terhadap Renstra DPMD/N tahun 2021-2026, terutama dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada periode Renstra yang sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Peraturan Bupati No. ... Tahun 2021 Tentang Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Misi ke-3 dan Misi ke-1.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2022

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari.
4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka DPMD/N menetapkan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa/Nagari.
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan/Nagari.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.
4. Meningkatkan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka memacu Pembangunan Sosial Ekonomi di Nagari.
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di Nagari.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2022 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri No. 00578 Tahun 2020.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPMD/N yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah sub kegiatan yang akan mendorong meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya reformasi birokrasi di DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan DPMD/N Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut.

Tabel 3.1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 Pemindahan Tugas ASN 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pengadaan Mebel 4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pemeliharaan Mebel

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk mencapai target kinerja DPMD/N sesuai dengan rumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N tahun 2021-2026, maka program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari 4 program yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program Administrasi Pemerintahan Desa merupakan salah satu Program Unggulan untuk mencapai visi dan Misi Kepala Daerah 2021-2026. Program-program lainnya adalah program pendukung pencapaian misi pertama dan ketiga Kepala Daerah tahun 2021-2026. Misi pertama dan ketiga secara berurutan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan dan Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 3.2

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	PROGRAM PENINGKATAN	1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	KERJASAMA DESA		2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 17 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 6 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2022 akan melaksanakan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah kegiatan 8 kegiatan 53 sub kegiatan. Kemudian program urusan pemberdayaan masyarakat dengan 4 program, 4 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Kab. Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2020)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	5,667,348,877			100%	6,410,742,737
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	151,578,200			100%	181,262,325
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	50,010,700	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	65,000,000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	12,015,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	13,817,250
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	11,615,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	13,357,250
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	10,806,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	11,886,600
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	11,200,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	12,880,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKJP, SPBE, dan PK)	DPMDN	5 Dokumen	37,662,000	DAU	Rutin OPD	5 Dokumen	43,311,300
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	DPMDN	4 Laporan	18,269,500	DAU	Rutin OPD	4 Laporan	21,009,925
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	100%	3,220,285,377			100%	3,450,790,412
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji	DPMDN	27 ASN	2,799,958,677	DAU	Rutin OPD	27 ASN	3,359,950,412

							dan tunjangannya							
2	13	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	DPMDN	12 Bulan	364,980,000	DAU	Rutin OPD	-	20,000,000
2	13	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	DPMDN	3000 Dokumen	7,296,700	DAU	Rutin OPD	-	15,000,000
2	13	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	DPMDN	12 Bulan	10,450,000	DAU	Rutin OPD	-	11,495,000
2	13	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	9,350,000	DAU	Rutin OPD	-	11,220,000
2	13	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	DPMDN	4 Dokumen	10,450,000	DAU	Rutin OPD	-	12,540,000
2	13	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	DPMDN	12 Dokumen	7,350,000	DAU	Rutin OPD	-	8,085,000
							Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	DPMDN	1 Dokumen				-	
2	13	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	DPMDN	1 Dokumen	10,450,000	DAU	Rutin OPD	-	12,500,000
		01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100%	26,958,000			100%	37,000,000
2	13	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	1 Dokumen	7,990,000	DAU	Rutin OPD	-	10,000,000
2	13	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	DPMDN	1 Dokumen	4,650,000	DAU	Rutin OPD	-	6,000,000
2	13	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	DPMDN	2 Laporan	10,090,000	DAU	Rutin OPD	2 Laporan	15,000,000
2	13	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	DPMDN	12 Bulan	4,228,000	DAU	Rutin OPD	-	6,000,000
2	13	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat		100%	171,506,500			100%	194,990,000

						daerah								
2	13	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	DPMDN	1 Unit	6,500,000	DAU	Rutin OPD	-	8,500,000
2	13	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMDN	48 Stel	24,000,000	DAU	Rutin OPD	-	25,000,000
2	13	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	DPMDN	47 Dokumen	14,066,500	DAU	Rutin OPD	-	16,000,000
2	13	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	DPMDN	12 bulan	8,000,000	DAU	Rutin OPD	-	12,000,000
2	13	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP ASN	DPMDN	28 Dokumen	7,500,000	DAU	Rutin OPD	-	10,000,000
2	13	01	2.05	08		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	DPMDN	2 ASN	10,000,000	DAU	Rutin OPD	-	10,000,000
2	13	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMDN	5 ASN	17,375,000	DAU	Rutin OPD	-	22,500,000
2	13	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	5 ASN	54,440,000	DAU	Rutin OPD	46 Orang	55,440,000
2	13	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	5 ASN	29,625,000	DAU	Rutin OPD	-	35,550,000
2	13	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100%	445,890,300			100%	604,500,000
2	13	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	DPMDN	6 Jenis	6,925,000	DAU	Rutin OPD	-	7,000,000
2	13	01	2.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMDN	5 Jenis	7,045,000	DAU	Rutin OPD	-	6,000,000
2	13	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	DPMDN	3 Paket	14,900,000	DAU	Rutin OPD	-	16,500,000
2	13	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	DPMDN	6 Paket	25,000,600	DAU	Rutin OPD	-	26,000,000
2	13	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	DPMDN	8 Jenis	29,999,300	DAU	Rutin OPD	-	35,000,000

							Jumlah penggandaan yang disediakan	DPMDN	2990 lembar				-	0
2	13	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	DPMDN	180 Eksemplar	3,600,000	DAU	Rutin OPD	-	4,000,000
2	13	01	2.06	07		Penyediaan Bahan Material	Jumlah bahan material yang disediakan	-	0	-	-	-	10 unit	3,000,000
2	13	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	DPMDN	600 orang	18,000,000	DAU	Rutin OPD	-	27,000,000
2	13	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	DPMDN	150 Laporan	327,674,000	DAU	Rutin OPD	150 Laporan	450,000,000
							Jumlah makan minum rapat yang disediakan	DPMDN	300 Porsi				300 Porsi	-
2	13	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	DPMDN	1 Laporan	12,746,400	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	15,000,000
2	13	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	-	0	-	-	-	12 Bln	15,000,000
2	13	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan		100%	900,301,000			100%	1,199,200,000
2	13	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	DPMDN	1 Unit	370,225,000	DAU	Rutin OPD	1 Unit	450,000,000
2	13	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	DPMDN	4 Unit	128,876,000	DAU	Rutin OPD	4 Unit	300,000,000
2	13	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah filling kabinet yang diadakan	DPMDN	2 Unit	60,500,000	DAU	Rutin OPD	20 unit	85,000,000
							Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan	DPMDN	1 Set					
							Jumlah lemari arsip yang diadakan	DPMDN	1 Unit					
							Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan	DPMDN	13 Unit					-
2	13	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	DPMDN	14 unit	171,500,000	DAU	Rutin OPD	10 unit	160,000,000
2	13	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	-	0	-	-	-	2 unit	35,000,000
2	13	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan	Jumlah gudang yang	DPMDN	1 Unit	99,200,000	DAU	Rutin OPD	1 paket	99,200,000

						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	diadakan							
2	13	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tempat parkir yang diadakan	DPMDN	1 Paket	70,000,000	DAU	Rutin OPD	1 Paket	70,000,000
2	13	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	270,530,000			100%	312,000,000
2	13	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	DPMDN	4 Jenis	5,420,000	DAU	Rutin OPD	4 Jenis	6,000,000
2	13	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	DPMDN	12 Rekening	38,400,000	DAU	Rutin OPD	12 Rekening	56,000,000
							Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	DPMDN	360 Meter Kubik				360 Meter Kubik	-
							Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	DPMDN	12000 KWh				12000 KWh	-
2	13	01	2.08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DPMDN	31 Unit	20,070,000	DAU	Rutin OPD	31 Unit	25,000,000
2	13	01	2.08	04		Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	DPMDN	21 Orang	206,640,000	DAU	Rutin OPD	21 Orang	225,000,000
2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD			480,299,500				431,000,000
2	13	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DPMDN	19 Unit	235,250,000	DAU	Rutin OPD	19 Unit	150,000,000
							Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	DPMDN	14 unit				14 unit	-
							Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	DPMDN	5 Unit				5 Unit	-
2	13	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	0	-	-	-	5 unit	7,000,000

						Operasional atau Lapangan								
2	13	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	DPMDN	125 Paket	10,000,000	DAU	Rutin OPD	125 Paket	12,000,000
2	13	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/kantor lainnya	DPMDN	6 Paket	15,569,500	DAU	Rutin OPD	6 Paket	17,000,000
							Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	DPMDN	23 Unit				23 Unit	-
2	13	01	2.09	06		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	DPMDN	1 Unit	19,840,000	DAU	Rutin OPD	1 Unit	25,000,000
2	13	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	DPMDN	10 Paket	150,040,000	DAU	Rutin OPD	10 Paket	160,000,000
2	13	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	DPMDN	10 Paket	49,600,000	DAU	Rutin OPD	10 Paket	60,000,000
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10,941,236,600				7,331,500,000
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa		2.50%	146,050,000			5.00%	300,000,000
2	13	02	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa		2.50%	146,050,000			5.00%	300,000,000
2	13	02	2.01	01		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase penetapan dan penegasan batas desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.50%	146,050,000	DAU	Prioritas OPD(Permendagri No. 45 Tahun 2016)	5.00%	300,000,000
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase terbentuknya kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan		54.43%	389,954,100			56.96%	485,000,000
2	13	03	2.01			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan		43 Nagari	389,954,100			90 Nagari	485,000,000

								berjalan							
2	13	04	2.02	07			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	Kabupaten Lima Puluh Kota	82%	165,994,000	DAU	IKU OPD	85%	220,000,000
								Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 BUMDesma			4 BUMDesma		
2	13	04	2.02	08			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	Kabupaten Lima Puluh Kota	52 Nagari	802,397,000	DAU	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 112 Tahun 2014)	-	150,000,000
2	13	04	2.02	09			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	150,000,000	DAU	Prioritas OPD	79 Nagari	60,000,000
2	13	04	2.02	11			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	39 Nagari	130,000,000	DAU	IKU OPD (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2007 , Permendagri No. 13 Tahun 2012 dan Permendes No. 2 Tahun 2017)	39 Nagari	175,000,000
								Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan		45 Nagari				45 Nagari	
								Jumlah nagari dengan status swadaya		2 Nagari				2 Nagari	
								Jumlah nagari dengan status swasembada		28 Nagari				28 Nagari	
								Persentase nagari dengan status mandiri		1.25%				1.25%	
								Persentase nagari dengan status tertinggal		2.50%				2.50%	
2	13	04	2.02	12			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Mananajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	250 Orang	487,500,000	DAU	Prioritas OPD	250 Orang	120,000,000
2	13	04	2.02	13			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis	Kabupaten Lima Puluh Kota	86%	232,785,500	DAU	Prioritas OPD	86%	95,000,000

								aplikasi							
2	13	04	2.02	14			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Orang	357,002,600	DAU	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 110 Tahun 2016)	79 Orang	200,000,000
2	13	04	2.01	15			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Nagari	322,500,000	DAU	IKU OPD	2 Nagari	250,000,000
								Terlaksananya kegiatan Orthoretifikasi Citra Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota							
2	13	04	2.02	16			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	Kabupaten Lima Puluh Kota	50%	85,000,000	DAU	IKU OPD	50%	93,500,000
								Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku		70%				70%	
2	13	04	2.01	18			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	46 Nagari	211,969,000	DAU	Prioritas OPD (Amanat Permendagri No. 81 Tahun 2015)	46 Nagari	135,000,000
								Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan		34 Nagari				34 Nagari	
								Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten		3 Nagari				3 Nagari	
								Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.		7 Kegiatan				7 Kegiatan	
								Jumlah Inovasi dan		3 Inovasi				3 Inovasi	

								Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional							
2	13	05					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakatr Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		95%	5,076,741,000				3,743,000,000
2	13	05	2.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		95%	5,076,741,000				3,743,000,000
2	13	05	2.01	01			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	Kab. Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	260,000,000	DAU	Prioritas OPD	1 Kegiatan	140,000,000
2	13	05	2.01	02			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	Kab. Lima Puluh Kota	79 Kader	2,323,270,000	DAU	IKU OPD	79 Kader	748,000,000
								Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	12 PT	-	DAU	Prioritas OPD	12 PT	-
								Jumlah pembinaan KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan		95 KPM, RDS		DAU	Prioritas OPD	95 KPM, RDS	
								Jumlah Lembaga Adat		8 Lembaga		DAU	Prioritas OPD	8 Lembaga	

								yang mendapatkan pembinaan		Adat				Adat	
								Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan		20 Lembaga		DAU	Prioritas OPD	20 Lembaga	
								Jumlah Pokja Posyandu Aktif,		5 Pokja Posyandu		DAU	Prioritas OPD	5 Pokja Posyandu	
								Jumlah Rakoor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten		2 kegiatan		DAU	Prioritas OPD	2 kegiatan	
								Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitas Penataan , Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	1 Regulasi	-	DAU	Prioritas OPD	1 Regulasi	-
								Persentase Posyandu Aktif Mandiri		13%		DAU	Prioritas OPD	13%	
2	13	05	2.01	03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM aktif	Kab. Lima Puluh Kota	60%	860,304,000	DAU	IKU OPD	60%	900,000,000
								Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	Kab. Lima Puluh Kota	40 KPMD	-	DAU	Prioritas OPD	40 KPMD	-
								Jumlah kelompok BP-SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	Kab. Lima Puluh Kota	60 KP-SPAM	-	DAU	Prioritas OPD	60 KPSMPAM	-
								Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	3 kegiatan	-	DAU	Prioritas OPD	3 kegiatan	-
2	13	05	2.01	05			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	Kab. Lima Puluh Kota	62 KMN	40,217,000	DAU			80,000,000
2	13	05	2.01	06			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek Yang Terbentuk	Kab. Lima Puluh Kota	6 posyantek	242,950,000	DAU	Prioritas OPD	6 posyantek	210,000,000
								Jumlah Gelar TTG yang	Kab. Lima	3 Kgt	-	DAU	Prioritas OPD	3 Kgt	-

							diikuti	Puluh Kota						
2	13	05	2.01	07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang akan Melaksanakan Pencanangan BBGRM Tahun 2022	Kab. Lima Puluh Kota	79 Nagari	150,000,000	DAU	Prioritas OPD	79 Nagari	165,000,000
2	13	05	2.01	08		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota yang mendapatkan pembinaan	Kab. Lima Puluh Kota	93 Klpk	1,200,000,000	DAU	IKD	93 Klpk	1,500,000,000
							Jumlah			16,608,585,477				13,742,242,737

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja DPMD/N Tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 yaitu sebanyak 5 Program dan 12 Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Rencana Kinerja DPMDN dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKU DPMDN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7562	0.772	
		Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	
		Persentase Desa/Nagari Mandiri	5%	8%	
		Persentase Desa/Nagari Tertinggal	2.50%	1.25%	
		Persentase Nagari dengan Penyelesaian RKP, APBD/N Dan LKPI Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	80%	85%	
		Persentase Nagari yang Menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	50%	75%	
		Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari	3%	25%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Indeks ABS SBK	1.5	1.7	
		Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Adat	55%	60%	
		Persentase Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) yang Aktif	80%	82%	
		Persentase Posyandu yang Aktif Mandiri	13%	14%	

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET		Ket.
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
	Adat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	60%	65%	
3.	Terfasilitasi Penyusunan Profil Nagari	Persentase Penyelesaian Profil Nagari	49%	53%	
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	39	42	

Tahun 2021 merupakan masa peralihan Kepala Daerah, sehingga tahun 2022 merupakan pelaksanaan Renstra tahun pertama pada Kepala Daerah baru. Penyusunan rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu kepada Rancangan Akhir Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Sedangkan untuk target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket.
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	81	82	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,5	1,25	
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5	5	

Tabel 4.3
Rencana Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7562	0.772	

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan
DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

No.	Bidang Urusan	Tahun 2022		Tahun 2023	Tahun 2022		Tahun 2023	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program dan kegiatan pada setiap OPD	1	5,667,348,877	6,410,742,737	8	5,667,348,877	6,410,742,737	
2.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	4	10,941,236,600	7,331,500,000	4	10,941,236,600	7,331,500,000	
	Total	5	16,608,585,477	13,742,242,737	12	16,608,585,477	13,742,242,737	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari ini disusun mengacu pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Renja ini memuat hal-hal yang terkait dengan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021, permasalahan serta rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang disusun pada Renja Tahun 2022, adalah program-program yang akan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan serta mendorong pencapaian target kinerja, maka diperlukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan diantaranya adalah seluruh sumber daya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPMDN Tahun 2022. Selanjutnya untuk menjamin konsistensi, sinergitas, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan Renja, maka diperlukan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022 yang akan dilaporkan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 sehingga dapat mencapai target kinerja DPMD/N yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Agustus 2021

KEPALA DPMD/N
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Drs. A. Zuhdi Perama, P, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004

